



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO OPD

Triwulan I Tahun 2023

DISUSUN OLEH:

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KOTA SURAKARTA

Jl. Yap Tjwan Bing (Jagalan) No. 26 Surakarta Telp/FAX (0271)

656816

PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah SWT karena atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya,

laporan penyelenggaraan Pengelolaan Risiko OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023 ini telah diselesaikan.

Laporan ini merupakan salah satu kewajiban selaku Unit Pemilik Risiko dalam pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dengan harapan adanya upaya perbaikan terus-menerus atas permasalahan yang ada melalui kegiatan pengendalian intern yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan, hambatan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah selama TA 2023.

Semoga laporan yang disusun ini bermanfaat, khususnya bagi pengambil kebijakan di lingkungan OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pengendalian intern yaitu tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan, akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas seluruh bantuannya dalam penyelesaian laporan ini.

Surakarta, 5 April 2023

Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Surakarta



Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680223 199208 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	4
BAB II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	5
A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Organisasi Perangkat Daerah Triwulan I	5
B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Organisasi Perangkat Daerah Triwulan I	5
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	6
BAB IV MONITORING RISIKO DAN TINDAK LANJUT	7
BAB V PENUTUP	8

Lampiran (bukti dukung) :

Lampiran 1 : Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan RTP atas Hasil Identifikasi Risiko Operasional OPD

Lampiran 2 : Realisasi Kegiatan Pengelola Resiko

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah No 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah, OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berusaha memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan membantu program pemerintah dengan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta perlu melakukan pengelolaan risiko yang berwujud pengendalian realisasi RTP berdasarkan Rencana Kinerja yang sudah ditetapkan secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Pemerintah Kota Surakarta telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan tata kelola risiko yang merupakan salah satu proses dalam mewujudkan Maturitas SPIP Terintegrasi. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta adalah:

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta.
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah No 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah
5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
7. Keputusan Kepala OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Nomor TN/16/I/2023 tentang Struktur Pengelolaan Risiko pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan pengelolaan risiko yang berwujud pengendalian realisasi RTP berdasarkan Rencana Kinerja yang sudah ditetapkan untuk menjamin terlaksa dan tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Tujuan pengelolaan risiko yang berwujud pengendalian realisasi RTP untuk mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengelolaan Risiko mencakup kegiatan pengendalian atas risiko Strategis Pemda, Strategis OPD dan Operasional OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023.

BAB II
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN
RISIKO

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko

Rencana Pengelolaan/pengendalian merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor. Adapun kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun dapat dilihat pada lampiran I.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah direncanakan telah dilaksanakan. Pembangunan kegiatan pengendalian tersebut sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Adapun pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Atas beberapa kegiatan pengendalian yang direncanakan telah dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan efektivitas penanganan risiko. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Triwulan I tidak terdapat masalah atau hambatan

BAB IV

MONITORING RISIKO DAN TINDAK LANJUT

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta pada Triwulan I tidak memiliki hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak diperlukan upaya sebagai bentuk pengendalian atas risiko yang muncul, termasuk atas hambatan yang muncul, sehingga tidak perlu dilakukan monitoring dan tindak lanjut

BAB VI

PENUTUP

Pengelolaan Risiko Strategis Pemda, Strategis OPD dan Operasional OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023 merupakan salah satu penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada komponen Struktur dan Proses dalam rangka mewujudkan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Laporan Pengelolaan Risiko ini menjadi instrumen untuk menilai memantau capaian perbaikan sekaligus pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Surakarta, 5 April 2023

Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Surakarta



Dr. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19680223 199208 1 002

Lampiran 1

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
RTP atas Hasil Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Surakarta
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis OPD : Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil
 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	EKEKTE	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Risiko Operasional OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							
1	Tidak tepatnya penentuan langkah pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	ROO.23.09.12.23	Koordinasi lintas bidang dan sektoral dalam penyediaan data ternak	frekuensi perubahan populasi ternak yang cukup cepat	E	pendataan dilakukan secara terjadwal dan rutin	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
2	Masih terdapat produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya	ROO.23.09.12.34	Pengujian kualitas produk olahan ikan (uji formalin dan merkuri) di pengolah ikan dan sebagian pasar	Belum semua produk olahan ikan dilakukan pengujian dan belum semua jenis pengujian dilakukan pada produk olahan ikan	E	Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
	Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota							

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	EKEKTE	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
3	Tidak tepatnya penentuan langkah pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	ROO.23.09.12.23	Koordinasi lintas bidang dan sektoral dalam penyediaan data ternak	frekuensi perubahan populasi ternak yang cukup cepat	E	pendataan dilakukan secara terjadwal dan rutin	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
4	Masih terdapat produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya	ROO.23.09.12.34	Pengujian kualitas produk olahan ikan (uji formalin dan merkuri) di pengolah ikan dan sebagian pasar	Belum semua produk olahan ikan dilakukan pengujian dan belum semua jenis pengujian dilakukan pada produk olahan ikan	E	Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
	Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan							
5	Tidak tepatnya penentuan langkah pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	ROO.23.09.12.23	Koordinasi lintas bidang dan sektoral dalam penyediaan data ternak	frekuensi perubahan populasi ternak yang cukup cepat	E	pendataan dilakukan secara terjadwal dan rutin	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
6	Masih terdapat produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya	ROO.23.09.12.34	Pengujian kualitas produk olahan ikan (uji formalin dan merkuri) di pengolah ikan dan sebagian pasar	Belum semua produk olahan ikan dilakukan pengujian dan belum semua jenis pengujian dilakukan pada produk olahan ikan	E	Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
7	Tidak tepatnya penentuan langkah pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	ROO.23.09.12.23	Koordinasi lintas bidang dan sektoral dalam penyediaan data ternak	frekuensi perubahan populasi ternak yang cukup cepat	E	pendataan dilakukan secara terjadwal dan rutin	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
8	Masih terdapat produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya	ROO.23.09.12.34	Pengujian kualitas produk olahan ikan (uji formalin dan merkuri) di pengolah ikan dan sebagian pasar	Belum semua produk olahan ikan dilakukan pengujian dan belum semua jenis pengujian dilakukan pada produk olahan ikan	E	Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	EKEKTE	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Kegiatan : Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan							
9	Tidak tepatnya penentuan langkah pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	ROO.23.09.12.23	Koordinasi lintas bidang dan sektoral dalam penyediaan data ternak	frekuensi perubahan populasi ternak yang cukup cepat	E	pendataan dilakukan secara terjadwal dan rutin	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
10	Masih terdapat produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya	ROO.23.09.12.34	Pengujian kualitas produk olahan ikan (uji formalin dan merkuri) di pengolah ikan dan sebagian pasar	Belum semua produk olahan ikan dilakukan pengujian dan belum semua jenis pengujian dilakukan pada produk olahan ikan	E	Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis							
11	kesadaran keamanan pangan pelaku usaha yang dibina rendah	ROO.23.09.12.12	Sosialisasi Keamanan pangan bagi pelaku usaha dan Bimtek Keamanan Pangan bagi pelaku usaha	Pelaku usaha di pasar tradisional tidak bisa mengintervensi keamanan produk yang dijual	E	Pemantauan keamanan pangan di pasar Modern dan tradisional dengan bekerjasama dengan Tim JKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023

Nama Pemda : Pemerintah Kota Surakarta
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis OPD : Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil
 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	EKEKTE	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Risiko Operasional OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
1	Kualitas cadangan pangan berupa beras akan menurun	ROO.23.09.12.02	Pemeliharaan dengan fumigasi	Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas cadangan pangan	E	Monitoring cadangan beras secara rutin	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
2	Penduduk rawan pangan tidak bisa ditangani secara merata	ROO.23.09.12.36	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk krawan pangan serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan melebihi alokasi anggaran	E	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
	Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							
3	Kualitas cadangan pangan berupa beras akan menurun	ROO.23.09.12.02	Pemeliharaan dengan fumigasi	Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas cadangan pangan	E	Monitoring cadangan beras secara rutin	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	EKEKTE	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
4	Penduduk rawan pangan tidak bisa ditangani secara merata	ROO.23.09.12.36	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan melebihi alokasi anggaran	E	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							
5	Kualitas cadangan pangan berupa beras akan menurun	ROO.23.09.12.02	Pemeliharaan dengan fumigasi	Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas cadangan pangan	E	Monitoring cadangan beras secara rutin	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
6	Penduduk rawan pangan tidak bisa ditangani secara merata	ROO.23.09.12.36	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan melebihi alokasi anggaran	E	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
	Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							
7	Kualitas cadangan pangan berupa beras akan menurun	ROO.23.09.12.02	Pemeliharaan dengan fumigasi	Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas cadangan pangan	E	Monitoring cadangan beras secara rutin	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
8	Penduduk rawan pangan tidak bisa ditangani secara merata	ROO.23.09.12.36	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan melebihi alokasi anggaran	E	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							
9	Kualitas cadangan pangan berupa beras akan menurun	ROO.23.09.12.02	Pemeliharaan dengan fumigasi	Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas cadangan pangan	E	Monitoring cadangan beras secara rutin	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	EKEKTE	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
10	Penduduk rawan pangan tidak bisa ditangani secara merata	ROO.23.09.12.36	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan melebihi alokasi anggaran	E	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya							
11	Terjadinya lonjakan harga pangan	ROO.23.09.12.01	Monitoring ketersediaan pangan dan koordinasi dengan daerah pemasok pangan	Keterlambatan pasokan pangan	E	Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusi pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
12	Ketersediaan cadangan pangan tidak sesuai batas yang diwajibkan	ROO.23.09.12.04	Penghitungan cadangan pangan sesuai kementan	Hasil perhitungan cadangan pangan tidak digunakan sebagai acuan penentuan pengadaan cadangan pangan	E	Mengusulkan alokasi cadangan pangan sesuai perhitungan kebutuhan cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
13	Penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) tidak bisa mendapat cadangan pangan untuk rawan pangan secara merata	ROO.23.09.12.08	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) melebihi alokasi anggaran	E	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
14	Masyarakat masih mengonsumsi produk pangan berbahan dasar tepung terigu	ROO.23.09.12.35	Sosialisasi Pangan Lokal dengan pelatihan olahan pangan lokal	Hasil olahan pangan non terigu kurang diminati	KE	Pelatihan olahan pangan lokal bagi masyarakat dan Kelompok Kawasan Mandiri Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-10-2023
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	EKEKTE	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
15	Terjadinya lonjakan harga pangan	ROO.23.09.12.01	Monitoring ketersediaan pangan dan koordinasi dengan daerah pemasok pangan	Keterlambatan pasokan pangan	E	Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusi pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
16	Ketersediaan cadangan pangan tidak sesuai batas yang diwajibkan	ROO.23.09.12.04	Penghitungan cadangan pangan sesuai kementan	Hasil perhitungan cadangan pangan tidak digunakan sebagai acuan penentuan pengadaan cadangan pangan	E	Mengusulkan alokasi cadangan pangan sesuai perhitungan kebutuhan cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
17	Penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) tidak bisa mendapat cadangan pangan untuk rawan pangan secara merata	ROO.23.09.12.08	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) melebihi alokasi anggaran	E	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
18	Masyarakat masih mengkonsumsi produk pangan berbahan dasar tepung terigu	ROO.23.09.12.35	Sosialisasi Pangan Lokal dengan pelatihan olahan pangan lokal	Hasil olahan pangan non terigu kurang diminati	KE	Pelatihan olahan pangan lokal bagi masyarakat dan Kelompok Kawasan Mandiri Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-10-2023
	Sub Kegiatan : Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
19	Terjadinya lonjakan harga pangan	ROO.23.09.12.01	Monitoring ketersediaan pangan dan koordinasi dengan daerah pemasok pangan	Keterlambatan pasokan pangan	E	Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusi pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
20	Ketersediaan cadangan pangan tidak sesuai batas yang diwajibkan	ROO.23.09.12.04	Penghitungan cadangan pangan sesuai kementan	Hasil perhitungan cadangan pangan tidak digunakan sebagai acuan penentuan pengadaan cadangan pangan	E	Mengusulkan alokasi cadangan pangan sesuai perhitungan kebutuhan cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	EKEKTE	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
21	Penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) tidak bisa mendapat cadangan pangan untuk rawan pangan secara merata	ROO.23.09.12.08	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) melebihi alokasi anggaran	E	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
22	Masyarakat masih mengkonsumsi produk pangan berbahan dasar tepung terigu	ROO.23.09.12.35	Sosialisasi Pangan Lokal dengan pelatihan olahan pangan lokal	Hasil olahan pangan non terigu kurang diminati	KE	Pelatihan olahan pangan lokal bagi masyarakat dan Kelompok Kawasan Mandiri Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-10-2023
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
23	Terjadinya lonjakan harga pangan	ROO.23.09.12.01	Monitoring ketersediaan pangan dan koordinasidengan daerah pemasok pangan	Keterlambatan pasokan pangan	E	Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusipangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
24	Ketersediaan cadangan pangan tidak sesuai batas yang diwajibkan	ROO.23.09.12.04	Penghitungan cadangan pangan sesuai kementan	Hasil perhitungan cadangan pangan tidak digunakan sebagai acuan penentuan pengadaan cadangan pangan	E	Mengusulkan alokasi cadangan pangan sesuai perhitungan kebutuhan cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
25	Penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) tidak bisa mendapat cadangan pangan untuk rawan pangan secara merata	ROO.23.09.12.08	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) melebihi alokasi anggaran	E	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	EKEKTE	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
26	Masyarakat masih mengkonsumsi produk pangan berbahan dasar tepung terigu	ROO.23.09.12.35	Sosialisasi Pangan Lokal dengan pelatihan olahan pangan lokal	Hasil olahan pangan non terigu kurang diminati	KE	Pelatihan olahan pangan lokal bagi masyarakat dan Kelompok Kawasan Mandiri Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-10-2023
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota							
27	Terjadinya lonjakan harga pangan	ROO.23.09.12.01	Monitoring ketersediaan pangan dan koordinasi dengan daerah pemasok pangan	Keterlambatan pasokan pangan	E	Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusi pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
28	Ketersediaan cadangan pangan tidak sesuai batas yang diwajibkan	ROO.23.09.12.04	Penghitungan cadangan pangan sesuai kementan	Hasil perhitungan cadangan pangan tidak digunakan sebagai acuan penentuan pengadaan cadangan pangan	E	Mengusulkan alokasi cadangan pangan sesuai perhitungan kebutuhan cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
29	Penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) tidak bisa mendapat cadangan pangan untuk rawan pangan secara merata	ROO.23.09.12.08	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) melebihi alokasi anggaran	E	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
30	Masyarakat masih mengkonsumsi produk pangan berbahan dasar tepung terigu	ROO.23.09.12.35	Sosialisasi Pangan Lokal dengan pelatihan olahan pangan lokal	Hasil olahan pangan non terigu kurang diminati	KE	Pelatihan olahan pangan lokal bagi masyarakat dan Kelompok Kawasan Mandiri Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-10-2023
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang							

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	EKEKTE	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
31	Terjadinya lonjakan harga pangan	ROO.23.09.12.01	Monitoring ketersediaan pangan dan koordinasi dengan daerah pemasok pangan	Keterlambatan pasokan pangan	E	Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusi pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
32	Ketersediaan cadangan pangan tidak sesuai batas yang diwajibkan	ROO.23.09.12.04	Penghitungan cadangan pangan sesuai kementan	Hasil perhitungan cadangan pangan tidak digunakan sebagai acuan penentuan pengadaan cadangan pangan	E	Mengusulkan alokasi cadangan pangan sesuai perhitungan kebutuhan cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
33	Penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) tidak bisa mendapat cadangan pangan untuk rawan pangan secara merata	ROO.23.09.12.08	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) melebihi alokasi anggaran	E	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-12-2023
34	Masyarakat masih mengkonsumsi produk panganberbahan dasar tepung terigu	ROO.23.09.12.35	Sosialisasi Pangan Lokal dengan pelatihan olahanpangan lokal	Hasil olahan pangan non terigu kurang diminati	KE	Pelatihan olahan pangan lokal bagi masyarakat danKelompok Kawasan Mandiri Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31-10-2023


Kota Surakarta, 5 April 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Surakarta

Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si
NIP. 196802231992081002

Lampiran 2

No.	RTP	Lingkup RTP	Infokom AB1/ Monitoring AB2	Rencana Pelaksanaan	Triwulan	Catatan	Hasil Review	Validitas Status	Simpulan Realisasi Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusi pangan	Operasional OPD (ROO)	Infokom AB1 : Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusi pangan	31-12-2023	TW I	OKE	OKE	Valid	Sudah Dilaksanakan
2	Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusi pangan	Operasional OPD (ROO)	Monitoring AB2 : Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusi pangan	31-12-2023	TW I	OK	OK	Valid	Sudah Dilaksanakan
3	Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan	Operasional OPD (ROO)	Infokom AB1 : Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan	30-06-2023	TW I	Bukti Sesuai	Bukti Sesuai	Valid	Sudah Dilaksanakan
4	Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan	Operasional OPD (ROO)	Monitoring AB2 : Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan	30-06-2023	TW I	ok	ok	Valid	Sudah Dilaksanakan

Kota Surakarta, 5 April 2023
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 Kota Surakarta



[Signature]
Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si
 NIP : 196802231992081002